



---

---

## Dampak Maraknya Impor Beras di Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir terhadap Kesejahteraan Petani Padi

Azza Indah Kusumastuti<sup>1</sup>, Septi Amanda Indriani<sup>1</sup>, Tiara Febriyani<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT, Politeknik APP Jakarta

Diterima 15 Desember 2023/ Direvisi 10 Januari 2024/ Disetujui 23 Januari 2024

### ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak memproduksi beras di dunia, namun masih menjadi negara importir beras. Hal ini dikarenakan para petani di Indonesia masih menggunakan teknik pertanian yang buruk dan teknokogi yang kurang memadai. Bila dikombinasikan dengan populasi yang besar dan konsumsi perkapita yang tinggi, membuat Indonesia mengonsumsi beras dalam jumlah yang sangat besar. Kebutuhan akan beras sebagai makanan pokok masyarakat dengan jumlah populasi tinggi. Namun pada kenyataannya, sebagian besar orang yang bergantung pada pertanian tetap miskin. Jika diteruskan, kegiatan impor beras dirasa akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan petani padi Indonesia karena beras impor masuk dengan harga jual yang lebih rendah akan menyulitkan petani lokal untuk bersaing dan menjualkan hasil panennya. Masyarakat umumnya akan lebih memilih beras impor dengan harga yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Indonesia masih mengandalkan impor beras dari negara lain karena pemenuhan kebutuhan beras di dalam negeri belum sepenuhnya terpenuhi. Jurnal ini dibuat dengan studi literatur dengan isu terkait untuk mengetahui dampak negatif dari kegiatan impor beras terhadap petani padi lokal, seperti faktor perbedaan harga dan kualitas, beras impor lebih murah daripada beras lokal, berdasarkan kualitas dan harga. Selisih harga beras impor dengan beras lokal di tahun 2022 semakin melebar, beras impor berhasil menduduki harga yang lebih murah di level produsen jika dibandingkan dengan harga beras lokal. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas beras lokal. Mulai dari penggunaan teknologi yang memadai dan proses dari pemilihan bibit hingga panen. Karena faktor kualitas padi dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk wilayah pertanian, kadar air, dan dukungan teknologi.

**Kata Kunci:** Beras; Impor; Kebutuhan; Kesejahteraan; Petani.

### ABSTRACT

Even though Indonesia is one of the countries that produce the most rice in the world, it is still a rice-importing country. This is because farmers in Indonesia still use poor agricultural techniques and inadequate technology. Combined with a large population and high per capita consumption, Indonesia consumes rice in large quantities. There is a need for rice as a staple food for communities with high populations. However, in reality, most people who depend on agriculture remain poor. If it continues, it is felt that rice import activities will impact the economy and welfare of Indonesian rice farmers because imported rice comes in at a lower selling price, making it difficult for local farmers to compete and sell their crops. People generally prefer imported rice at a cheaper price to meet their daily food needs. Indonesia still relies on imports from other countries because domestic rice needs must be fully met. This journal was created by studying literature on related issues to determine the negative impact of rice import activities on local rice farmers, such as price and quality differences. Imported rice is cheaper than local rice based on quality and price. The difference in price between imported rice and local rice in 2022 will widen; imported rice has succeeded in occupying a lower price at the producer level when compared to the price of local rice. Efforts are needed to improve the quality and productivity of local rice. They start with adequate technology and the process of selecting seeds for harvesting because several things, including agricultural area, water content, and technological support, influence rice quality.

**Keywords:** Farmers; Imports; Needs; Rice; Welfare

**CONTACT** Tiara Febriyani [tiarafebriyani47@gmail.com](mailto:tiarafebriyani47@gmail.com)

© 2024 The Author(s). Published by Kadiri University

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

## PENDAHULUAN

Beras sebagai salah satu komoditi pangan paling penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Selain menjadi bahan makanan pokok, masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai sumber nutrisi dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Upaya dalam mewujudkan kesejahteraan ketahanan pangan nasional di suatu negara khususnya Indonesia salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Untuk mengetahui kemampuan negara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional yang kemudian menjadi negara dengan kedaulatan pangan yang baik dilakukan secara bertahap, diikuti dengan perluasan lahan pertanian sebagai salah satu penunjang produktivitas pertanian dengan tujuan peningkatan angka kesejahteraan petani lokal (Id, 2007).

Konsumsi beras di Indonesia juga meningkat menjadi sebanyak 30,2 juta ton pada tahun 2022 atau sebesar 0,5 persen dibandingkan pada konsumsi beras masyarakat di tahun 2021 yang sebanyak 30,04 juta ton. Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan data luas panen padi pada periode di tahun 2021 yang besarnya 10,41 juta hektare dengan jumlah produksi sebesar sekitar 54,42 juta ton GKG, kemudian mengalami fluktuasi di periode tahun selanjutnya. Pada data periode tahun 2022, luas lahan panen padi diperkirakan sebesar 10,61 juta hektare dengan jumlah produksi sebesar 55,67 juta ton GKG. Artinya baik luas lahan panen dan jumlah produksi di periode tahun tersebut mengalami peningkatan sebesar 194,71 ribu hektare atau 1,87 persen pada luas lahan panen dan 1,25 juta ton GKG atau 2,31 persen

pada jumlah produksi padi Indonesia (BPS, 2023). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Indonesia saat ini sedang mengalami kekeringan yang cukup parah. Kebutuhan akan muncul sebagai pertumbuhan populasi yang meningkat sering. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat yang terkena dampak tetap miskin tidak sendirian.

Dengan adanya produksi beras yang meningkat di Indonesia, pemerintah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan beras nasional. Indonesia selalu mengimpor beras sejak zaman orde lama dan orde baru, meskipun pada waktu itu, Indonesia pernah memiliki swasembada beras. Ini terjadi meskipun Indonesia saat ini menduduki posisi ketiga sebagai penghasil beras terbesar di dunia. Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan dan memiliki kendali atas impor beras. Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/2018 mengatur ekspor dan impor beras. Pemerintah sering menggantungkan impor untuk menambah stok beras di dalam negeri dan mendapatkan beras dengan harga yang lebih murah. Selain sebagai stok dalam negeri, ada defisit beras di beberapa provinsi. Ini disebabkan oleh penyaluran pasokan beras yang terhambat dan luasan panen sawah yang menurun karena cuaca ekstrem. Pemerintah harus mengimpor beras karena permintaan dan konsumsi beras yang tinggi di dalam negeri menyebabkan defisit beras di beberapa wilayah, termasuk Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, dan sebagian besar Papua Barat dan Papua (Darwanto & Rahayu, 2017).

Di samping tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang tinggi, faktor

lain yang mendorong kegiatan impor beras Indonesia yakni adanya pengalihan fungsi lahan. Lahan pertanian yang awalnya difokuskan sebagai lahan pertanian kemudian diganti menjadi lahan untuk kepentingan industri seperti pabrik, atau bahkan perumahan baru untuk pemukiman warga. Fenomena alih fungsi lahan tersebutlah yang nantinya menghalau fokus utama bidang pertanian beras nasional.

Pemerintah memberlakukan kegiatan impor beras dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan nasional. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 berbunyi bahwa ketahanan pangan dapat diwujudkan dengan bantuan peran Masyarakat dan pemerintah dan dikembangkan mulai tingkat rumah tangga. Apabila setiap masyarakat Indonesia telah berhasil mencapai tahap ketahanan pangan yang dimaksud dengan pemenuhan makanan pokok dari beras lokal maka bersamaan dengan itu, ketahanan pangan baik kalangan masyarakat, daerah yang tersebar di Indonesia, dan secara nasional akan tercapai sesuai yang diharapkan bersama (Ketaren & Rangkyu, 2021). Kegiatan impor diharapkan akan membantu pemerintah dalam pemenuhan tersebut.

Sejak lama, Impor beras diyakini menjadi isu penting di Indonesia. Masyarakat menganggap keputusan melaukan impor beras akan merugikan pihak petani dan tidak lagi sesuai dengan cita-cita perwujudan kedaulatan pangan nasional. Masyarakat seringkali lupa bahwa kegiatan impor yang tetap dilakukan akan sangat merugikan petani dan negara sendiri. Harga beras impor yang masuk dengan harga relatif murah akan dengan mudah menguasai pasar lokal. Perbedaan harga beras impor dengan beras lokal di tahun 2022

semakin melebar, beras impor berhasil menduduki harga yang lebih murah di level produsen jika dibandingkan dengan harga beras lokal (Jiuhardi, 2023)

Salah satu hasil dari kebijakan impor saat ini adalah peningkatan pemenuhan konsumsi pangan nasional. Di sisi lain, salah satu indikator kedaulatan pangan yang diharapkan oleh pemerintah ini dapat terkena dampak kebijakan impor. Tidak lain dan tidak bukan adalah tingkat kesejahteraan petani pangan. Bertambahnya pasokan makanan di pasar domestik akan dipengaruhi oleh peningkatan impor. Penurunan harga akan terjadi jika penambahan pasokan pangan tidak diikuti oleh peningkatan permintaan dalam jumlah yang sama. Penurunan harga yang disebabkan oleh kelebihan pasokan tersebut tidak hanya akan berdampak pada penurunan pendapatan petani, tetapi juga dapat mendorong petani untuk terus menanam tanaman pangan atau bahkan meningkatkan skala produksinya.

Sejumlah negara mengatur perdagangan beras untuk melindungi kesejahteraan petani dan stabilitas pangan domestik dengan menerapkan kebijakan seperti tarif impor, lisensi impor, dan kuota impor (Carolina & Sirait, 2018). Petani padi akan dianggap sejahtera ketika angka biaya produksi dan angka hasil penjualan memiliki selisih yang cukup besar, atau ketika hasil penjualan produksi lebih besar daripada biaya produksi dan konsumsi. Dengan kata lain, pendapatan petani pangan akan meningkat jika dibandingkan dengan pengeluarannya.

Berbagai faktor mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran petani pangan, termasuk harga komoditas pangan di dalam dan luar negeri.

Oleh karena itu, penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang terjadi dari kegiatan impor beras yang dilakukan terhadap kesejahteraan petani padi di Indonesia. Keseimbangan dari banyaknya konsumsi beras masyarakat Indonesia dengan jumlah panen dan lahan yang digunakan petani padi di Indonesia, jika kapasitas produksi beras dan konsumsi beras dalam negeri mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan, maka kegiatan impor beras tidak lagi diperlukan, mengingat hal tersebut tidaklah sesuai dengan tujuan awal dilakukannya perencanaan impor.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian jurnal Dampak Maraknya Impor Beras di Indonesia Dalam 5 Tahun Terakhir Terhadap Kesejahteraan Petani Padi menggunakan metode Tinjauan Literatur. Tinjauan Literatur ini menganalisis penelitian dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan Dampak Maraknya Impor Beras di Indonesia Dalam 5 Tahun Terakhir Terhadap Kesejahteraan Petani Padi untuk merumuskan pemahaman tentang topik tersebut. Hasil penelitian terdiri dari analisis literatur yang berkaitan dengan teori karya ilmiah, buku, jurnal nasional, dan sebagainya. Pembahasan dilakukan secara konseptual dengan menggunakan rujukan sebagai bahan perbandingan. Tujuan dari tinjauan literatur ini diharapkan akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana Dampak Maraknya Impor Beras di Indonesia Dalam 5 Tahun Terakhir Terhadap Kesejahteraan Petani Padi. Tinjauan juga akan melihat penelitian sebelumnya tentang subjek yang sama dan menemukan pertanyaan penelitian atau celah pengetahuan yang belum terjawab.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagian besar penduduk Indonesia mengonsumsi beras setiap hari sebagai makanan pokok. Namun pada kenyataannya, pemenuhan kebutuhan beras di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Ada pihak yang merasa tidak diuntungkan dari kegiatan impor tersebut, yaitu petani padi. Karena hal tersebut, padi yang dihasilkan dari petani lokal kedatangan pesaing baru. Jika dilihat dari beberapa faktor perbedaan harga dan kualitas, beras impor lebih murah daripada beras lokal, berdasarkan kualitas dan harga.

Untuk mengetahui kualitas beras hasil panen yang baik dapat dilakukan pengecekan standar kualitas beras salah satunya dengan menggunakan sistem standarisasi mutu beras dalam perdagangan beras. Sistem standarisasi pada beras ini telah diterapkan untuk beras yang akan dipasarkan di Indonesia, beras yang lolos hasil uji sistem standarisasi tersebut menjamin mutu beras yang akan dijual kepada masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Setelah melalui sistem standarisasi mutu beras, akan diterbitkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang teruji sertifikat laboratorium uji (Munarso *et al.*, 2020). Beras dengan hasil uji akan meyakinkan konsumen atas kualitas yang diberikan, hal ini menjadi salah satu cara untuk tetap mempertahankan penjualan beras dari petani lokal.

Ketika mendekati musim panen, pemerintah justru membuka kegiatan impor beras yang akhirnya masuk dengan harga dan kualitas lebih murah jika dibandingkan dengan beras hasil panen petani lokal. Situasi tersebut akan berdampak buruk bagi petani lokal, bagian terburuknya adalah petani lokal dapat dianggap gagal (Basuki *et al.*,

2021). Harga beras impor di pasaran sebesar Rp. 8.500 - Rp. 9.000/KG. Berdasarkan hasil literatur, pada tahun 2018 Indonesia melakukan kegiatan impor beras dari negara Vietnam dengan jenis beras yang sama yaitu beras premium. Impor dilakukan per 14 Januari 2018, beras impor dari Vietnam yang masuk ke pasar Indonesia memasang harga Rp. 10.700/ KG dalam rupiah, sedangkan per tanggal yang sama, harga beras hasil panen petani lokal berkisar Rp. 10.300/KG dalam rupiah, harga pasaran beras di Indonesia jenis premium pada tahun itu berkisar di angka 12.800 – 13.600/KG dalam rupiah (Simbolan, 2005). Jika dilihat dari harga pasaran, harga beras impor dari Vietnam dapat memenangkan pasar karena dijual di pasar dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan beras lokal dengan jenis kualitas yang sama.

Permasalahan kualitas padi sering terjadi di dunia nyata, diantaranya karena wilayah yang penyerapan padi nya rendah dan menyebabkan kualitasnya dibawah rata-rata. Kualitas padi yang baik atau tidak juga ditentukan oleh kadar air. Oleh sebab itu, jika beras lokal kita ingin bersaing dengan beras impor, Pemerintah seharusnya memberikan fasilitas (teknologi) yang memadai bagi para petani dengan harapan kualitas beras lokal yang dihasilkan dapat maksimal. Beras lokal yang kini masih memiliki kualitas dibawah rata-rata bukanlah semata-mata kesalahan petani Indonesia, namun kurangnya dukungan teknologi dan sosialisasi tentang ketahanan pangan beras yang berpengaruh besar terhadap hasil panen.

Dalam budidaya makanan pokok ini, yang sangat utama ialah seberapa banyak suplai air nya. Upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah yaitu dengan membuat bendungan dan

saluran irigasi yang mampu mengairi sawah di wilayah yang membutuhkan. Petani dapat tetap memiliki pasokan air yang cukup di musim kemarau dengan bantuan bendungan dan saluran irigasi. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahkan dapat meningkatkan jumlah hasil panen.

Pemerintah juga harus memberikan kemudahan lainnya kepada petani untuk meningkatkan produktivitas petani dalam menghasilkan panennya. Dengan memberikan pinjaman kredit murah kepada UMKM dari pemerintah, untuk bisa mendapatkan fasilitas yang memadai. Jika surplus beras terjadi dengan meningkatkan produktivitas maka kebutuhan beras di Indonesia akan terpenuhi. Untuk mengurangi kegiatan impor padi, selain meningkatkan kualitas dan ketersediaan padi di Indonesia, langkah lain yang dapat diambil adalah menerapkan kebijakan impor, seperti tarif Bea Masuk, lisensi impor dan kuota impor untuk melindungi petani domestik. Kebijakan impor berupa penentuan volume impor beras juga sebaiknya diatur karena, jika tidak maka, akan terjadi surplus beras yang mengakibatkan turunnya harga beras yang beredar di pasaran (Wibawa *et al.*, 2023).

Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi masalah besar dalam memenuhi kebutuhan pangan negaranya. Kemandirian pangan adalah salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan sektor pertanian.

Sekitar 30 juta hektare dari 80 juta hektare lahan pertanian Indonesia dapat digunakan sebagai lahan pertanian produktif. Namun, hal-hal seperti produktivitas yang rendah, kualitas benih dan pupuk yang buruk, dan petani yang

tidak memiliki akses ke teknologi pertanian modern terus menghalangi petani untuk memaksimalkan potensi pertanian Indonesia. Untuk memaksimalkan potensi pertanian Indonesia, pemerintah harus meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan kualitas benih dan pupuk, serta meningkatkan akses petani terhadap teknologi pertanian canggih. Kementerian Pertanian telah memberikan dukungannya kepada sektor pertanian Indonesia yakni memberi bantuan subsidi pupuk sebesar Rp. 28,5 triliun di tahun 2018 dan Rp. 29,5 triliun di tahun 2019 (Akuntansi, 2022).

Permasalahan selanjutnya ada pada sektor lahan pertanian yang dipengaruhi dari tingkat produktivitas, faktor luar dari alam seperti tidak menentukannya iklim dan cuaca yang tidak dapat terprediksi, dan juga faktor banyaknya kebutuhan air yang menurun atau kualitas air yang kurang dari kualitas standar. Hal tersebut diyakini akan menghambat produktivitas petani padi Indonesia untuk dapat menghasilkan panen padi dengan kualitas baik. Apabila produktivitas petani padi dimaksimalkan dalam jangka Panjang, maka hasil panen yang diberikan akan siap bersaing pada pasar internasional dan Indonesia nantinya akan lebih mandiri untuk dapat memenuhi kebutuhan beras nasional dengan angka impor yang minim (Arimbawa & Widanta, 2017).

Sulitnya bersaing dengan beras impor dari luar yang masuk merambah pasar, tidak sedikit petani Indonesia yang berpindah profesi dan memutuskan untuk tidak lagi memilih profesi petani padi karena tidak terjaminnya kesejahteraan pekerjaan mereka sebagai petani padi lokal. Lahan pertanian yang seharusnya memiliki fungsi utama sebagai lahan pertanian, kemudian dialihkan fungsikan

menjadi lahan industri pabrik. Baik petani padi maupun masyarakat yang memiliki lahan pertanian pada akhirnya lebih memilih menjual lahan mereka kepada pengusaha asing yang ingin mengembangkan usahanya di Indonesia.

Pemerintah harus bertindak tegas atas apa yang sebenarnya terjadi, petani padi yang dirugikan dalam kegiatan impor beras, dan beras lokal yang terancam kehilangan pasar karena kesulitan bersaing dengan beras impor yang masuk dengan harga lebih murah. Dalam suatu kebijakan akan selalu muncul pihak-pihak yang pro maupun kontra dari hasil kebijakan tersebut, begitu juga terhadap kebijakan impor beras di Indonesia. Jika pemerintah Indonesia berada di pihak pro, pemerintah akan mendukung dan membuat kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah jalannya impor beras dan sebaliknya, jika pemerintah kontra akan kegiatan impor beras, maka pemerintah akan berpeluang untuk menolak bahkan membuat kebijakan yang nantinya akan mempersulit kegiatan impor beras di Indonesia (Kusumah, 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras Indonesia pada tahun 2018 mencapai 2.253.824 ton. Jika diteruskan, kegiatan impor beras dianggap akan berdampak negatif pada petani padi Indonesia sendiri, karena beras impor yang masuk dengan harga jual yang lebih rendah dan memiliki kualitas yang lebih baik dibanding beras dari petani lokal akan berdampak negatif pada kesejahteraan petani padi Indonesia. Masyarakat umumnya akan lebih memilih beras impor untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Sementara itu, jika kegiatan impor tetap dilakukan, dampak negatif lainnya akan dirasakan oleh negara, negara akan dirugikan dengan menumpuknya

persediaan beras hasil panen petani padi lokal yang kalah bersaing dengan beras impor yang masuk.

Persediaan beras lokal di gudang nasional mencapai angka 883.585 ton pada periode 14 Maret 2021 (Basuki *et al.*, 2021). Apabila dilakukan penyimpanan yang terlalu lama, kualitas padi dikhawatirkan akan menurun, dampak buruk lainnya akibat kegiatan impor beras yang dirasakan negara adalah penurunan devisa negara karena tidak melakukan ekspor melainkan impor.

Dalam proses pengelolaan beras lokal, terdapat aturan dan kebijakan yang menjadi patokan dari bagaimana seharusnya beras hasil petani lokal dikelola dengan baik dan benar. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 dari peraturan tersebut yakni menugaskan Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat petani dan konsumen; untuk mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP); serta melaksanakan pengadaan beras, distribusi beras yang merata, kebijakan terhadap kegiatan impor beras; dan untuk mengembangkan industri berbasis beras, serta mengelola gudang-gudang penyimpanan beras hasil panen petani lokal (Octania, 2021). Berdasar pasal yang ada, Gudang tempat penyimpanan beras lokal harus selalu dalam pengawasan Perum Bulog agar pengecekan kualitas beras lokal selalu diperbaharui.

Beras lokal yang terjaga baik mulai dari pra produksi, disimpan, dijual di pasaran ataupun didistribusikan ke daerah akan meningkatkan permintaan pasar. Apabila kebutuhan pangan nasional yang berhasil dipenuhi dengan hasil panen petani beras lokal, akan menjaga kestabilan pasar beras nasional. Hasil penjualan akan tersalurkan menjadi pendapatan bagi

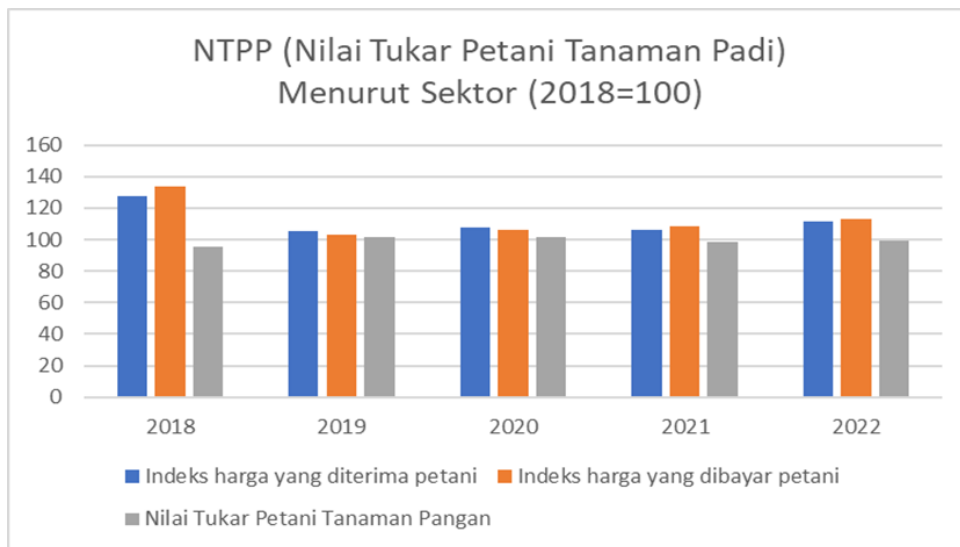
petani beras lokal. Selanjutnya dibutuhkan revitalisasi pertanian, revitalisasi pertanian adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan petani desa. Artinya ada keinginan dan kesadaran penuh untuk menjadikan sektor pertanian sebagai sektor paling unggul di negara Indonesia yang memiliki cukup banyak lahan (Ketaren & Rangkyu, 2021).

Diketahui bahwa tingkat pendapatan petani padi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah banyaknya biaya produksi dan harga pokok produksi yang dikeluarkan selama pra produksi sampai proses produksi, serta tingkat efektivitas kerja petani padi yaitu jumlah lamanya jam kerja dan hasil padi yang dapat diproduksi. Semakin tinggi angka efektivitas kerja petani padi maka akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan diterima (Saragih & Mariati, 2020).

Faktor penting lainnya menjadi alat hitung kesejahteraan petani di Indonesia adalah selisih dari besaran pendapatan dengan besaran biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut dapat dihitung dari perhitungan Nilai tukar petani (NTP) yang nantinya akan memperlihatkan rasio kesejahteraan petani lokal. Nilai tukar petani adalah rasio indeks yang diterima petani dengan indeks yang dibayar petani. Indikator yang digunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yaitu perbandingan indeks harga yang diterima dari penjualan hasil sekaligus digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan petani lokal (Zaril Gapari STIT Palapa, 2021).

NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) produk pertanian dengan

barang atau jasa yang dikonsumsi, serta biaya keperluan operasional produksi (Badan Pusat Statistik, n.d.)



Gambar 1. Grafik NTPP (Nilai Tukar Petani Tanaman Padi) Menurut Sektor (2018=100) (BPS, 2023)

Gambar 1 menunjukkan grafik Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan, terkhusus sektor pangan padi pada tahun 2018 – 2022 Januari beserta faktor yang memengaruhinya. Dapat dilihat beberapa faktor yang memengaruhi nilai petani yakni bahan penunjang pertanian diantaranya bibit dan pupuk dan pestisida. NTP > 100 menunjukkan bahwa petani mengalami surplus (Dahiri, 2022). Jika harga produksi naik lebih cepat daripada harga konsumsi, serta pendapatan petani meningkat dari pengeluarannya, maka tingkat kesejahteraan petani lebih baik daripada sebelumnya. Jika harga jual hasil produksi rendah dan harga konsumsi tidak naik, penurunan NTP dapat diartikan sebagai penurunan kesejahteraan petani yang dapat berdampak pada kemiskinan (Keumala & Zainuddin, 2018).

## KESIMPULAN

Sebagai negara dengan makanan pokok beras, Indonesia saat ini masih mengandalkan impor beras dari negara lain untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakatnya. Kegiatan impor beras yang diharapkan baik justru masih memiliki dampak negatif terhadap petani padi lokal. Harga beras impor yang masuk ke dalam negeri cenderung memiliki harga lebih murah dibandingkan harga beras lokal, hal tersebut membuat petani lokal merasa kesulitan untuk bersaing di pasar. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas beras lokal. Faktor kualitas padi dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk wilayah pertanian, kadar air, dan dukungan teknologi.

Pemerintah harus memberikan fasilitas teknologi dan infrastruktur yang memadai kepada petani untuk meningkatkan kualitas beras lokal. Pembangunan bendungan dan saluran irigasi yang memadai dapat



meningkatkan produktivitas petani dengan memastikan pasokan air yang cukup, terutama selama musim kemarau. Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada petani melalui pinjaman dan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Kemandirian pangan adalah tujuan penting, dan pemerintah perlu meningkatkan produktivitas pertanian, kualitas benih, dan akses petani terhadap teknologi pertanian modern untuk mencapai tujuan ini. Kegiatan impor beras dapat merugikan petani, mengurangi devisa negara, dan mempengaruhi kesejahteraan petani. Penyimpanan yang terlalu lama dapat mengurangi kualitas padi lokal.

Indikator yang umumnya digunakan sebagai alat ukur kesejahteraan petani lokal adalah Nilai tukar petani (NTP). NTP mencerminkan kemampuan biaya konsumsi yang dikeluarkan petani-petani di pedesaan. Grafik NTP dalam sektor pangan padi di tahun 2018 hingga Januari 2023 menunjukkan fluktuasi dalam tingkat kesejahteraan petani. NTP adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara harga produksi petani dan harga konsumsi. Pemahaman NTP penting karena dapat membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan pertanian dan menjaga kesejahteraan petani. Analisis NTP dapat membantu memastikan pendapatan yang diperoleh petani lokal yang cukup dan sebanding, hal tersebut akan mendorong tingkat produktivitas di sektor pertanian khususnya di bidang pangan.

Dengan memperhatikan masalah dan kesimpulan di atas, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan produksi beras lokal, meningkatkan kualitas dan

ketersediaan sumber daya bagi petani, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung kemandirian pangan Indonesia dan kesejahteraan petani.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

*Alhamdulillah*, Segala puji serta Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. atas rahmat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal kami yang berjudul “Dampak Maraknya Impor Beras Dalam 5 Tahun Terakhir Terhadap Kesejahteraan Petani Padi” dengan tepat waktu. Shalawat tak lupa terpanjat kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Sehubungan dengan selesainya proses penulisan jurnal kami, maka perkenankan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Rinandita Wikansari, S.Psi, M.Psi selaku Dosen Bahasa Indonesia Politeknik APP Jakarta yang telah membimbing kami dalam penulisan jurnal ini dan kepada rekan yang membantu dalam proses penyusunan jurnal ini.

Kami selaku penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan yang tidak disengaja dalam penulisan jurnal ini. Maka dari itu, kami sangat terbuka akan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Besar harapan kami semoga jurnal ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami selaku penulis dan umumnya bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, P. S. (2022). 1\*, 2 1,2. 20(1), 105–123.
- Arimbawa, P. D., & Widanta, A. . B. P. (2017). Pengaruh Luas Lahan, Teknologi dan Pelatihan Terhadap Pendapatan Petani Padi dengan Produktivitas sebagai Variabel Intervening di Kecamatan Mengwi. *Arimbawa, Dika Putu*, 6, 1601–1627.
- Basuki, Z. M., Putra Hidayat, R. J., Asih, P. S., & Sihidi, I. T. (2021). Analisis Kebijakan Impor Beras 1 Juta Ton Oleh Pemerintah Indonesia: Data Dan Analisis Media Sosial. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 474–495. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.485>
- Carolina, M., & Sirait, R. A. (2018). Pengaruh Impor Pangan Terhadap Kesejahteraan Petani Pangan. *Jurnal Budget*, 3(2), 1–19. <https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/download/50/42>
- Id, S. (2007). 复印件 Draft 1. August 2006, 1–45.
- Jiuhardi. (2023). Analisis Kebijakan Impor Beras Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Indonesia. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 19(1), 1–13.
- Ketaren, A., & Rangkuty, R. P. (2021). Kajian Pembangunan Ketahanan Pangan Keluarga Petani. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 218. <https://doi.org/10.29103/jspm.v2i2.5646>
- Keumala, C. M., & Zainuddin, Z. (2018). Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani ( NTP ) dan Pembiayaan Syariah sebagai Solusi Cut Muftia Keumala Zamzami Zainuddin Pendahuluan Salah satu sumber kebutuhan utama manusia berasal dari sektor. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 129–149.
- Kusumah, F. P. (2019). Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.135-156>
- Munarso, S. J., Kailaku, S. I., & Indriyani, R. (2020). Physical Quality of Several Segments of Rice: Subsidized, Non-subsidized, and Imported. *Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, 84, 1–10.
- Octania, G. (2021). Peran Pemerintah dalam Rantai Pasok Beras Indonesia. *Cips*, 32, 44.
- Saragih, F. S., & Mariati, R. (2020). Analisis Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Berdasarkan Pendapatan Dan Konsumsi di Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan (Analysis of Household Welfare of Lowland Paddy Farmer based on Income and Consumption in Sindang Sari Urban Village Sambutan Subcity). *Jurnal Agribisnis dan Komunikasi Pertanian (Journal of Agribusiness and Agricultural Communication)*, 3(2), 105. <https://doi.org/10.35941/jakp.3.2.2020.3867.105-112>

Simbolan. (2005). Kebijakan Impor Beras Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 24–45. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com),

Wibawa, N. C., Ardini, H., Hermawati, G., Firdausa, R. N., Anggoro, K. B., & Wikansari, R. (2023). Analisis Impor Beras Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Impor Beras. *Jurnal Economina*, 2(2), 574–585.  
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.337>

Zaril Gapari STIT Palapa, M. (2021). Pengaruh Kenaikan Harga Beras Terhadap Kesejahteraan Petani Di Desa Sukaraja. *PENSA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 14–26.  
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa>